



Siaran Pers

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) BAPETEN - DJBC

Jakarta, 1 Desember 2016

Sebagai bagian dari Program Prioritas Kedua BAPETEN 2015-2019, yaitu Dukungan Infrastruktur Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional dikaitkan dengan pemahaman internasional terhadap kondisi keamanan Indonesia, dipandang perlu melakukan pemasangan peralatan deteksi di pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara) atau pada objek vital nasional atau tempat lain yang dianggap perlu.

Dukungan terhadap program ini ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo melalui surat dari Sekretaris Kabinet bernomor B-201/Seskab/Polhukam/4/2016 berisi arahan Presiden kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memasang RPM di seluruh pelabuhan internasional, bandar udara internasional, dan pos lintas batas negara sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan zat radioaktif/bahan nuklir masuk/keluar wilayah Indonesia secara ilegal.

Saat ini sudah ada 6 pelabuhan laut di Indonesia yang telah dipasang RPM, yaitu: (1) Pelabuhan laut Tanjung Priok, Jakarta; (2) Pelabuhan laut Tanjung Perak, Surabaya; (3) Pelabuhan laut Batu Ampar, Batam; (4) Pelabuhan laut Belawan, Medan; (5) Pelabuhan laut Bitung, Manado; dan (6) Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.

DJBC sebagai satu-satunya instansi yang berwenang dalam membuka kontainer berdasarkan UU Kepabeanan, memegang peranan penting dalam pengoperasian RPM. Dengan keberadaan RPM, DJBC akan mampu mendeteksi keberadaan Zat Radioaktif dan/atau Bahan Nuklir serta bahan yang mengandung radioaktif di dalam kontainer tanpa harus membuka kontainer.

Untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengoperasian RPM di pintu-pintu masuk NKRI, maka pada hari Kamis (01 Desember 2016) dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BAPETEN dan DJBC, bertempat di kantor BAPETEN, Jakarta.

Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala BAPETEN, **Jazi Eko Istiyanto**, dan Dirjen Bea dan Cukai, **Heru Pambudi**, memuat beberapa poin penting, antara lain: (1) Dukungan operasi dan sarana prasarana; (2) Pertukaran informasi; (3) Penyusunan peraturan dan prosedur pengawasan bahan dan/atau barang dalam lingkup ketenaganukliran; (4) Kerjasama untuk kepentingan penelitian dan penyidikan pelanggaran kepabeanan terkait lalu lintas bahan dan/atau barang dalam lingkup ketenaganukliran; serta (5) Pengembangan dan pembinaan SDM.



Diharapkan dengan adanya MoU antara BAPETEN dan DJBC ini pengoperasian RPM di pelabuhan maupun koordinasi pada level manajemen serta pelaksana di lapangan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan komitmen Pemerintah RI terhadap dunia internasional di bidang keamanan nuklir.

Kontak: Abdul Qohhar T.E.P, Kepala Bagian Humas dan Protokol (HP. 0812 855.3205, email: info[at]bapeten[dot]go[dot]id)